

## Respons Pemuda Pedesaan Terhadap Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Ketersediaan Lapangan Kerja

### Authors:

Y Saraswati<sup>1\*</sup>, R. Sasongko<sup>2</sup>, H. R Adiyatna<sup>3</sup>, H. Yuliana<sup>3</sup>

### e-Mail:

[yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id](mailto:yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id)

### Affiliation:

Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Yogyakarta<sup>1</sup>  
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Yogyakarta<sup>2,3</sup>  
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka<sup>4</sup>

Received : Mei 20 2025  
Revised : June 20 2025  
Accepted : June 20 2025  
Available Online: June 30 2025

### Corresponding author

Yudhistira Saraswati  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta  
[yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id](mailto:yudhistira.saraswati@upnyk.ac.id)

### Abstrak

Ketimpangan pembangunan masih menjadi isu yang terus berlanjut di banyak daerah, seringkali bersumber dari implementasi kebijakan yang tidak seimbang dan disparitas antarwilayah. Pemuda, sebagai kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, sangat terdampak oleh kondisi tersebut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis respons pemuda di Provinsi Jawa Timur terhadap kebijakan pembangunan daerah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didukung oleh survei dan tinjauan pustaka, penelitian ini mengeksplorasi persepsi dan pengalaman pemuda terhadap inisiatif pembangunan yang dipimpin pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, pemuda di Jawa Timur menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan pembangunan daerah, mengakui adanya peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Namun, masih terdapat kekhawatiran yang signifikan, terutama terkait dampak terbatas dan tidak langsung dari kebijakan tersebut terhadap kesempatan kerja. Banyak pemuda, terutama yang berasal dari daerah pedesaan, menyatakan ketidakpuasan dengan kurangnya akses terhadap pekerjaan, yang memaksa mereka bermigrasi ke pusat kota atau provinsi lain untuk mencari prospek ekonomi yang lebih baik. Fenomena ini menyoroti kesenjangan kritis dalam perencanaan pembangunan yang inklusif. Studi ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan reformasi kebijakan strategis yang bertujuan untuk mengurangi disparitas antarwilayah dan meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah percepatan pembangunan di daerah tertinggal dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian, industri kreatif, dan manufaktur berbasis pedesaan. Penguatan sektor-sektor ini tidak hanya dapat menciptakan lapangan kerja berkelanjutan tetapi juga menghambat migrasi pemuda dan mendorong pertumbuhan regional yang seimbang. Studi ini berkontribusi pada wacana pembangunan yang berorientasi pada pemuda dan menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan yang mengupayakan strategi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata Kunci: respons pemuda, kebijakan pembangunan, disparitas regional, ketenagakerjaan, Jawa Timur.

## **Rural Youth Response to Regional Development Policies In the Availability of Jobs**

### **Abstract**

Development inequality remains a persistent issue in many regions, often stemming from imbalanced policy implementation and regional disparities. Youth, as a socially and economically vulnerable group, are particularly affected by such conditions. This study aims to analyze the responses of young people in East Java Province to local development policies. Using a descriptive qualitative approach supported by surveys and literature review, the research explores perceptions and experiences of youth toward government-led development initiatives. The findings reveal that, overall, youth in East Java demonstrate a positive attitude toward regional development policies, acknowledging improvements in infrastructure, education, and public services. However, significant concerns remain, particularly regarding the limited and indirect impact of such policies on employment opportunities. Many young people, especially those from rural areas, express dissatisfaction with the lack of accessible jobs, which compels them to migrate to urban centers or other provinces in search of better economic prospects. This phenomenon highlights a critical gap in inclusive development planning. The study underscores the urgent need for strategic policy reforms aimed at reducing regional disparities and enhancing youth participation in local development. One recommended approach is the acceleration of development in underdeveloped areas by optimizing local potentials such as agriculture, creative industries, and rural-based manufacturing. Strengthening these sectors can not only create sustainable employment but also curb youth migration and promote balanced regional growth. The study contributes to the discourse on youth-oriented development and serves as a reference for policymakers seeking inclusive and equitable development strategies.

**Keywords:** youth response, development policy, regional disparity, employment, East Java.

### **1. PENDAHULUAN**

Masalah sosial di pedesaan yang timbul akibat dari ketidakmerataan kebijakan pembangunan dalam suatu wilayah. Ketimpangan wilayah menjadi masalah sosial baru baik pada daerah maju hingga kawasan tertinggal. Di Provinsi Jawa Timur misalnya, daerah maju diidentikkan dengan status kota seperti halnya Kota Surabaya, Malang atau Kediri. Sedangkan daerah tertinggal terpusat pada kabupaten yang terletak di Pulau Madura dan daerah perbatasan seperti Kabupaten Bangkalan, Sumenep, Tuba, Pacitan, dan Ngawi. Gambaran tersebut menjadi salah satu dampak dari ketidakmerataannya pembangunan antar daerah.

Pada kajian Nabibah & Hanifa (2022) mengenai kemiskinan di Provinsi Jawa Timur jumlahnya cenderung meningkat antara tahun 2018 hingga 2021. Pada tahun 2021 berada di angka 11,45% sehingga Provinsi Jawa Timur mempunyai angka tertinggi penduduk miskin. Di wilayah perbatasan provinsi yang merupakan daerah pinggiran tidak lagi menjadi fokus utama pembangunan. Akumulasi pembangunan di pusat ekonomi tersebut berdampak terhadap kurangnya penataan dan pengembangan wilayah perbatasan (Wahyudi & Sari, 2011).

Akibatnya perkembangan ekonomi kota yang cepat dan tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah (Wulandari, 2017).

Dalam upaya pemerataan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencanangkan kebijakan hingga implementasi pembangunan pada beberapa sektor terutama yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 berfokus pada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata. Implementasi dilakukan di daerah tertinggal seperti pengembangan wisata di daerah potensial, pendampingan UMKM, pembangunan kawasan industri sekitar, dan pembangunan akses umum.

Dalam konteks pembangunan, pemuda diharapkan memiliki peran dan tanggungjawab untuk berkontribusi konkrit dalam pembangunan. Data Sensus Ekonomi Nasional Maret 2023, sekitar 21,09% penduduk Jawa Timur berusia 16-30 tahun, jumlahnya mencapai 8,95 juta jiwa (BPS, 2023). Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah pemuda terbesar kedua di Indonesia. Kelompok pemuda didominasi oleh generasi Z yang kritis dan melek terhadap teknologi. Hal ini menjadi modal besar dalam mempercepat pembangunan.

Selain diharapkan sebagai subjek pembangunan, pemuda merupakan kelompok yang sangat bergantung pada program – program pembangunan. Pada kelompok usia tersebut kebutuhan akan pendidikan dan lapangan pekerjaan menjadi kebutuhan mendasar yang membedakan dengan kelompok usia lain. Maka kebijakan – kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat mempengaruhi hak atas pemenuhan kebutuhan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengetahui respons terhadap kebijakan pembangunan yang ada di daerahnya.

Provinsi Jawa Timur merupakan wilayah yang mempunyai penduduk miskin tertinggi di Pulau Jawa. Angka kemiskinan mencapai 4.259,6 ribu jiwa pada tahun 2021 (Nabibah & Hanifa, 2022). Daerah termiskin didominasi oleh kabupaten yang berlokasi di Pulau Madura, sisa lainnya adalah berada di daerah perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Hal ini membuktikan bahwa daerah perbatasan mengalami kerentanan sosial sama dengan daerah terpencil padahal secara geografis letaknya lebih strategis.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur cenderung menurun sejak tahun 2021 sampai 2023. Namun daerah – daerah yang menyumbang angka kemiskinan tinggi masih pada beberapa daerah yang sama. Kabupaten/ kota yang mengalami kemiskinan tinggi berada di Pulau Madura dan daerah – daerah perbatasan. Rincian penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur 10 tertinggi dari data BPS pada tabel 1.

**Tabel 1**  
**Kemiskinan Kabupaten/ Kota Tertinggi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 – 2023 (%)**

Urutan	Kabupaten/ Kota	Kategori Wilayah	Tahun		
			2021	2022	2023
1	Sampang	Pulau Madura	23.76	21.61	21.76
2	Bangkalan	Pulau Madura	21.57	19.44	19.35
3	Sumenep	Pulau Madura	20.51	18.76	18.70
4	Probolinggo	Perbatasan	18.91	17.12	17.19
5	Tuban	Perbatasan	16.31	15.02	14.91

6	Ngawi	Perbatasan	15.57	14.15	14.40
7	Pamekasan	Pulau Madura	15.30	13.93	13.85
8	Pacitan	Perbatasan	15.11	13.80	13.65
9	Bondowoso	-	14.73	13.47	13.34
10	Lamongan	Perbatasan	13.86	12.53	12.42

Sumber: bps.go.id (2023)

Terlihat bahwa 10 daerah termiskin didominasi oleh kabupaten yang berlokasi di Pulau Madura, daerah perbatasan dengan Jawa Tengah, dan langsung dengan lautan. Hal ini membuktikan bahwa daerah perbatasan mengalami kerentanan sosial sama dengan daerah terpencil padahal secara geografis letaknya lebih strategis. Ketimpangan menimbulkan masalah sosial seperti kemiskinan yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Wahyudi & Sari (2011) permasalahan muncul di kawasan perbatasan antara lain adalah penataan dan pengembangan yang kurang; munculnya masalah sosial; orientasi dan keberpihakan pembangunan; serta konflik yang terjadi akibat ketimpangan pengelolaan dan pembangunan. Masalah kemiskinan masih menjadi masalah sosial utama di samping masalah kesehatan dan pendidikan.

Dari segi potensi, kabupaten – kabupaten tersebut memiliki potensi yang beragam. Kabupaten Pacitan sebagai contoh wilayah perbatasan dengan provinsi lain sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Hindia banyak memiliki pantai. Sebagian besar wilayahnya berupa karst sehingga terdapat goa alami sebagai objek wisata. Berdasarkan data Pacitan dalam Angka pada tahun 2023 jumlah wisatawan mencapai 1.566.186 orang dengan jumlah objek wisata terdaftar sebanyak 35 (BPS Kabupaten Pacitan, 2023).

Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur juga ditopang bidang UMKM. Peningkatan potensi UMKM dikarenakan adanya sektor pariwisata yang semakin maju dan tereksplor sehingga sektor perdagangan dan jasa serta sektor lain ikut berkembang. Seperti contoh jumlah UMKM yang sudah masuk taraf mapan di Kabupaten Pacitan pada 2023 terus mengalami peningkatan dengan tenaga kerja yang dapat diserap mencapai 4.622. Kabupaten Ngawi juga dikenal dengan potensi UMKM dengan produk unggulan tempe dan tas plastik. Zelvianagita & Prathama (2023) menyebutkan peningkatan pertumbuhan UMKM di Kabupaten Ngawi signifikan setiap tahunnya. Jumlahnya mencapai 84.729 unit pada tahun 2021 dari sebelumnya 84.251 unit pada tahun 2020.

Pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor yang dapat menyerap besar tenaga kerja. Paramithasari et al., (2021) menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur adalah salah satu wilayah produksi pertanian terbesar di Indonesia, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Penyerapan tenaga kerja terserap terbanyak pada sektor pertanian yakni sebesar 59%; sektor jasa 25% dan sektor manufaktur 15%. Produk Domestik Regional Bruto bahan pangan merupakan penyumbang terbesar sektor pertanian meskipun terus mengalami penurunan (Faturahman, 2017). Di sisi lain kebutuhan pangan daerah dapat terpenuhi karena jumlah penduduk yang rendah sehingga hasil produksi dari sektor pertanian dapat diekspor ke daerah lain.

Potensi identik yang dimiliki Provinsi Jawa Timur adalah potensi pengembangan produksi garam. Hal ini pada dilihat adanya terminal khusus garam di Kabupaten Pamekasan. Selain itu terdapat rumah garam yang berada di Kabupaten Pamekasan, Lamongan dan

Probolinggo. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2024, 70% produksi garam nasional ditopang dari Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 952.286,08 Ton. Hal ini menjadi potensi yang dapat dikembangkan terutama pada daerah – daerah yang berada di Pulau Madura.

## **2. METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dengan survey kepada responden. Responden dalam kajian ini merupakan pemuda pedesaan di daerah perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu di Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Pacitan. Usia responden cenderung homogen yaitu antara umur 16 sampai 19 tahun. Hal ini karena fokus kajian adalah pemuda di daerah pedesaan. Wilayah tersebut masuk dalam 10 kabupaten termiskin di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner kepada responden. Data lain didapatkan dengan pengamatan dan studi literatur. Pengamatan dilakukan dengan melihat kondisi fisik dan sosial masyarakat sebagai gambaran untuk memperkuat data. Studi literatur bertujuan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan tujuan. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel, grafik, dan diagram kemudian dilakukan analisis secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan, membandingkan, atau mendukung teori dan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari studi literatur. Penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan menganalisis respons pemuda desa terkait dengan kebijakan pembangunan yang terdapat di daerahnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kebijakan pembangunan nyatanya berpengaruh penting terhadap pengentasan kemiskinan. Kualitas sumberdaya manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur (Muslihatinningsih & Abidin, 2022). Namun kuantitas jumlah penduduk di pedesaan menjadi penting sebagai pendorong pembangunan. Akibat laju urbanisasi maka sumberdaya pedesaan akan tergerus. Kustanto & Sholihah (2020) mengatakan upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan.

Dalam upaya pemerataan pembangunan, setidaknya pemerintah daerah terus berupaya menggenjot perekonomian umumnya pada daerah – daerah miskin. Penyediaan lapangan kerja atau kemudahan akses modal usaha menjadi penting untuk melakukan pemerataan. Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 berupaya mengembangkan potensi sumberdaya tambang unggulan salah satunya wilayah Magetan, Ngawi, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Nganjuk, Tulungagung, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bojonegoro, Situbondo, dan Banyuwangi.

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 secara khusus berfokus pada pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Sektor pariwisata yang diarahkan untuk pengembangan melalui wisata halal. Jawa Timur merupakan daerah dengan sejarah islam yang kuat. Banyak makam para ulama dan bangunan

- bangunan bersejarah peradaban islam yang menjadi daya tarik wisata. Rencana pengembangan meliputi pemenuhan ketersediaan makanan halal, penyediaan fasilitas ibadah, bersuci, dan sarana atau pelayanan penunjang lain yang sesuai syariah.

Pengembangan sektor wisata belakangan ini gencar dikembangkan salah satunya melalui teknologi informasi sebagai media promosi. Sektor pariwisata berperan penting terutama dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi regional. Pengembangan seperti desa wisata dapat menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas inovasi, dan mendorong formalisasi serta pertumbuhan UMKM (Fasa et al., 2022). Potensi lain seperti sektor pertanian harus dikembangkan. Ginanjar (2020) berpendapat bahwa daerah basis pertanian, perkebunan, dan kehutanan di wilayah perbatasan dapat bekerja sama mengembangkan klaster industri pengolahan hasil di wilayah masing – masing dan tidak harus mengirimkan hasil komoditasnya ke perkotaan.

Pada poin kedua dijelaskan pada penguatan konektivitas antar wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur. Upaya percepatan pembangunan di Jawa Timur tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan – Kawasan Bromo – Tengger – Semeru (BTS), Serta Kawasan Selingkar Wilis, dan Lintas Selatan. Ginanjar (2020) menyebutkan bahwa peraturan tersebut tidak hanya berfokus menyelesaikan kesenjangan wilayah karena persoalan akses, tetapi juga pembangunan infrastruktur ekonomi untuk memperkuat posisi daerah. Penguatan dilakukan seperti pengembangan kawasan industri; pembangunan waduk untuk pertanian, penyediaan kebutuhan dan penanggulangan bencana; pasar induk; dan lainnya.

Pembangunan mengacu pada pembangunan fisik seperti infrastruktur dan pembangunan sumberdaya manusia. Secara garis besar, program pembangunan di beberapa daerah meliputi: pembangunan infrastruktur, penanganan kemiskinan, perbaikan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan pembangunan sosial budaya. Pembangunan dasar yang sifatnya fisik dan perbaikan fasilitas kebutuhan dasar seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.

Pada sektor UMKM, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian dengan berbagai program. Sinkronisasi dan harmonisasi program pemberdayaan UMKM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar optimal. Perlu adanya pemetaan potensi dan kebutuhan yang jelas.

### **Respons Kebijakan Pembangunan Daerah**

Pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumberdaya manusia telah dilakukan pemerintah. Kebijakan – kebijakan pembangunan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Salah satu tujuan dari pembangunan yang dilakukan adalah sebagai wujud pemerataan desa – kota. Beberapa kebijakan pembangunan yang telah dirumuskan dan dilakukan oleh pemerintah di antaranya pembangunan infrastuktur yang meliputi jalan, jembatan, dan sarana umum lainnya. Di samping itu juga pembangunan pada sektor industri termasuk pendirian pabrik atau pembangunan sarana yang mendukung sektor industri.

Pada pembangunan yang sifatnya non fisik meliputi pengembangan sumberdaya manusia melalui pemberian beasiswa pendidikan serta pelatihan – pelatihan untuk

mengembangkan keterampilan pada kelompok usia muda, petani, dan kelompok masyarakat lainnya. Dalam upaya pengembangan potensi wilayah dilakukan pengembangan desa wisata, wisata alam, serta pengembangan produk unggulan daerah berupa komoditas pertanian. Pengembangan lain adalah dunia usaha dengan pengembangan UMKM berupa bantuan pemasaran, peningkatan nilai produk, dan kemudahan akses modal seperti pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

**Tabel 2**

**Respons terhadap kebijakan dan kegiatan pembangunan di Provinsi Jawa Timur (%)**

No	Bidang Pembangunan	%			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Pembangunan sektor industri	13	46	41	100
2	Pembangunan infrastruktur	10	36	54	100
3	Perkembangan teknologi informasi	2	16	<b>82</b>	100
4	Pembangunan bidang pendidikan	4	9	<b>87</b>	100
5	Kemudahan akses modal usaha	4	20	<b>76</b>	100
6	Pengembangan potensi wilayah	3	28	<b>79</b>	110
7	Pengembangan UMKM dan usaha	4	30	66	100
8	Pelatihan/ pengembangan SDM	5	21	74	100
<b>Rata - rata</b>		<b>5</b>	<b>25</b>	<b>70</b>	<b>100</b>

Sumber: Data Primer (2024)

Respons pemuda terhadap pembangunan secara umum menunjukkan respons tinggi atau cenderung positif. Mereka menganggap bahwa kebijakan pembangunan berdampak pada kehidupan mereka secara individu maupun masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, pembangunan bidang pendidikan, pengembangan potensi wilayah, dan kemudahan akses modal usaha menunjukkan nilai mayoritas tinggi. Hal ini dikarenakan mereka adalah penerima program tersebut dan merasakan kebermanfaatannya. Kebijakan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dengan adanya beasiswa melalui Kartu Indonesia Pintar, peningkatan infrastruktur, dan sarana pengembangan keterampilan di sekolah. Kegiatan tersebut diterima oleh hampir seluruh siswa sekolah di Provinsi Jawa Timur sehingga menunjukkan respons yang positif. Kebijakan pembangunan yang menunjukkan respons tinggi lain adalah pembangunan bidang teknologi informasi.

Di sisi lain kebijakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur, sektor industri, dan UMKM responsnya cenderung sedang. Pembangunan infrastruktur dinilai masih kurang meskipun sudah banyak sarana prasarana seperti jalan dan fasilitas umum yang dibangun. Jalan – jalan pedesaan dan ruang terbuka diharapkan untuk diperbaiki. Pada sektor industri dan pengembangan UMKM dinilai masih kurang karena mereka belum merasakan manfaat secara langsung terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Respons terhadap kebijakan pembangunan berkaitan dengan dampak yang dirasakan terhadap kelangsungan hidup. Kebijakan pembangunan merupakan upaya dalam mengatasi masalah – masalah sosial yang ada di masyarakat hingga pada peningkatan kesejahteraan. Manfaat yang diperoleh dari kegiatan pembangunan secara umum meliputi kemudahan dalam melakukan aktivitas, penyerapan tenaga kerja, pengembangan diri, dan peningkatan ekonomi.

**Tabel 3.**

### Persepsi dampak kebijakan pembangunan (%)

No	Dampak Kebijakan Pembangunan	%			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total
1	Minat untuk bekerja akibat dari pembangunan industri/pabrik di daerah asal dan sekitarnya	13	46	41	100
2	Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum lain mencegah niat untuk urbanisasi	10	36	54	100
3	Pemanfaatan peluang kerja dari kemajuan teknologi informasi seperti adanya internet dan kemudahan lain sehingga dapat bekerja secara jarak jauh	2	16	<b>82</b>	100
4	Merasakan manfaat dari pembangunan sumberdaya manusia seperti pendidikan gratis atau beasiswa	4	9	<b>87</b>	100
5	Minat untuk memanfaatkan kemudahan akses peminjaman/ pemberian modal usaha	4	20	76	100
6	Pengembangan potensi wisata daerah dapat membuka kesempatan usaha/ lapangan kerja	3	28	69	100
7	Program pengembangan UMKM yang dilakukan menumbuhkan minat wirausaha	4	30	66	100
8	Program pelatihan yang dinilai dapat menambah keterampilan yang berguna membuka usaha/ mendapat pekerjaan yang layak	5	21	<b>74</b>	100
9	Program pembangunan secara keseluruhan bisa berdampak baik untuk kehidupan masyarakat	3	19	<b>79</b>	100
10	Program pembangunan secara keseluruhan membuat masyarakat tidak merantau	12	42	46	100

Sumber: Data Primer 2024

Mayoritas responden menyatakan bahwa mereka menggunakan dan menerima manfaat dari program pembangunan. Secara umum respons pemuda terhadap kebijakan pembangunan tinggi. Mereka menilai bahwa program pembangunan yang dilakukan di daerahnya sangat baik terutama pada sektor pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan gratis atau pemberian beasiswa. Di samping itu banyak pelatihan atau pengembangan lain terkait keterampilan yang difasilitasi oleh sekolah.

Persepsi pembangunan terkait dengan pembangunan sektor industri seperti pembangunan pabrik dan gudang – gudang, dinilai sudah dilakukan. Beberapa pabrik telah dibangun di sekitar daerah asal seperti di Kabupaten Magetan, Kabupaten Wonogiri, dan sekitarnya. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum sudah dilakukan. Akses jalan mulai dari jalan desa hingga jalan besar mengalami perbaikan.

Pengembangan potensi wilayah termasuk UMKM juga dinilai baik. Beberapa program pengembangan sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Serli & Kusuma (2023) membagi upaya pemerintah terhadap UMKM di Provinsi Jawa Timur secara garis besar terbagi menjadi pengembangan sumber daya manusia melalui program pembinaan dan pelatihan; membantu finansial yaitu dengan memfasilitasi akses pemodal; serta peningkatan penjualan produk yaitu dengan memfasilitasi pemasaran produk. Pada upaya peningkatan penjualan, dilakukan pendampingan dalam digital marketing agar mempunyai daya saing.

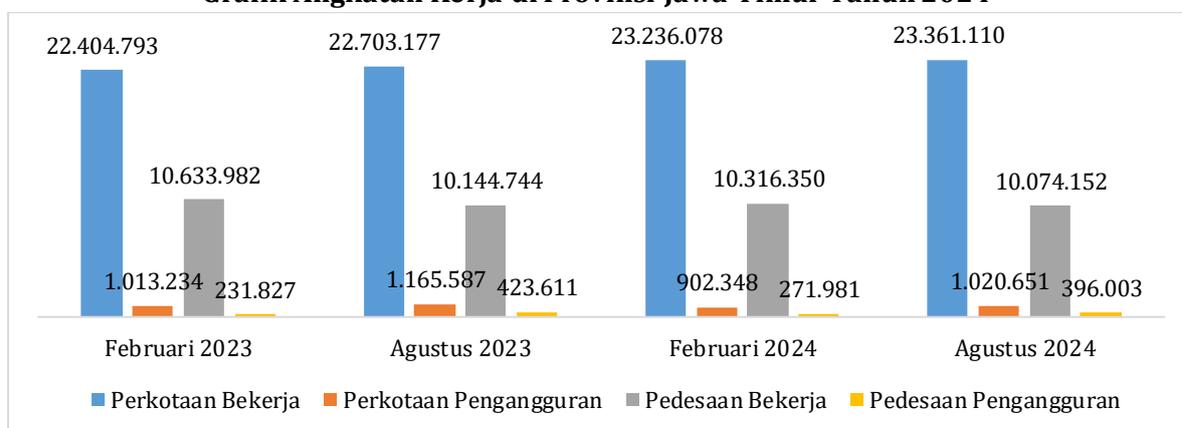
Pada dampak lain terkait dengan penyediaan lapangan kerja sehingga berdampak pada penekanan angka urbanisasi cenderung sedang. Padahal diperlukan perhatian besar industri manufaktur yang dapat mendorong penyediaan tenaga kerja. Hal tersebut berdampak pada persepsi bahwa program – program pembangunan tidak signifikan dapat menekan laju migrasi ke luar daerah. Kaum muda akan cenderung mencari pekerjaan ke luar daerah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak (K et al., 2022); (Deshmukh & Sankpal, 2022); (Shintawati, 2023).

Persoalan besar yang dihadapi negara dalam bidang ketenagakerjaan adalah kelebihan tenaga kerja serta kecilnya kesempatan kerja yang tercipta pada setiap sektor sehingga banyak terjadi pengangguran (Carolina, 2018). Tingkat pengangguran kelompok muda jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk. Adriyanto et al., (2020) menyebutkan penyebab dari hal tersebut adalah faktor struktural dan non struktural. Faktor struktural seperti kurangnya keterampilan, ketimpangan, kendala geografis, usia, dan kelangkaan informasi yang menghambat pasar kerja. Faktor non struktural yang terdiri dari kenaikan tingkat upah buruh, meningkatnya partisipasi perempuan ke dalam angkatan kerja, persepsi pemuda terhadap tingkat upah yang masih rendah, serta persepsi karir maupun lingkungan kerjanya.

Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur sebesar 4,23% pada bulan Agustus 2024. Jumlahnya sekitar 1,4 jiwa yang tersebar di daerah perkotaan maupun pedesaan. Meskipun kontribusi TPT di pedesaan lebih rendah, namun secara jumlah pemuda di pedesaan tidak sampai setengah dari jumlah pemuda di perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa populasi jumlah penduduk desa dan kota mengalami ketimpangan. Padahal kuantitas jumlah penduduk di pedesaan menjadi penting sebagai pendorong pembangunan. Kustanto & Sholihah (2020) mengatakan upaya mengatasi ketimpangan kemiskinan antara desa dan kota sulit terwujud manakala desa semakin kekurangan sumber daya manusia untuk melakukan pembangunan.

**Gambar 1.**

**Grafik Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**



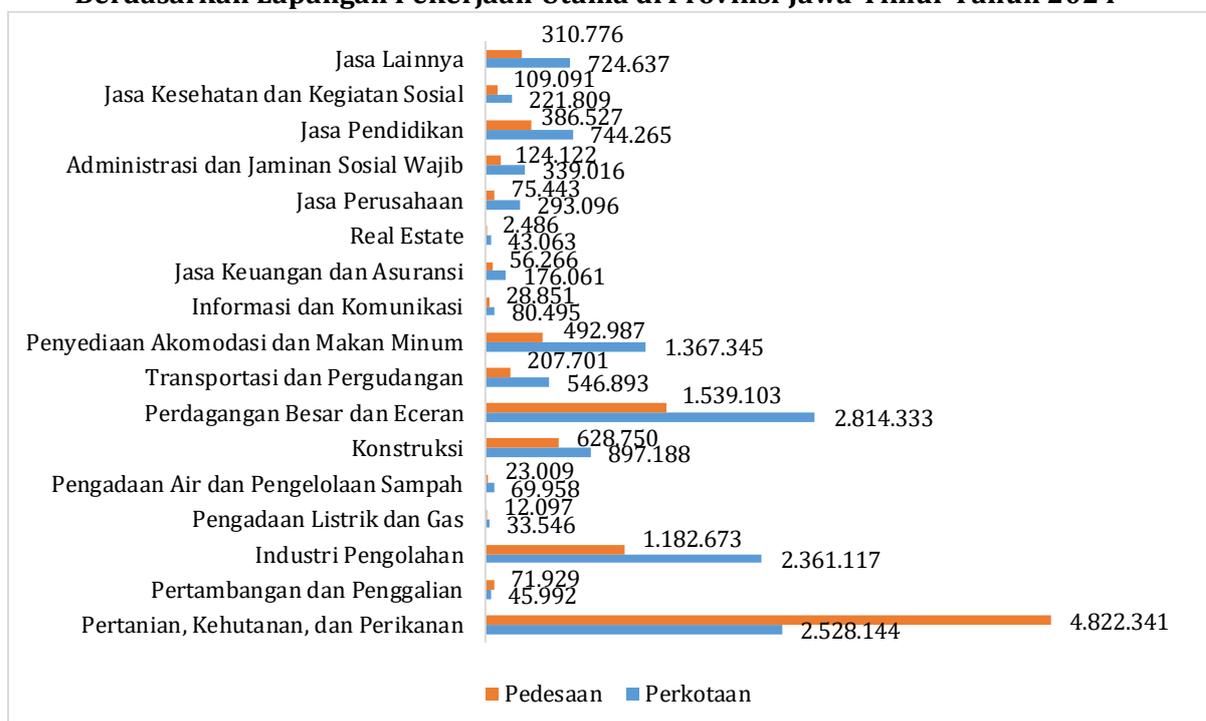
Sumber: Diolah dari Sakernas (2024)

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa angka pengangguran masih cukup tinggi. Meskipun begitu, presentase tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang

mencapai 4,88% dari seluruh angkatan kerja. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menekan angka TPT tersebut. Frisnoiry et al. (2024) menyebutkan bahwa faktor penyebab utama tingginya tingkat pengangguran adalah ketimpangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja, kebijakan pemerintah yang kurang pro-rakyat, pembangunan sektor ekonomi yang tidak realistis, dan pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Penduduk yang bekerja tersebar di berbagai sektor. Menurut kegiatan kerja selama seminggu terakhir, sektor pertanian luas yang meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi mayoritas. Sekitar 31% penduduk masih bekerja pada sektor tersebut, di pedesaan jumlahnya mencapai 47% dari seluruh penduduk yang bekerja. Sektor selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran yang mencapai 4.353.436 dan yang ketiga adalah sektor industri pengolahan berjumlah 3.543.790.

**Gambar 2.**  
**Grafik Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024**



Sumber: Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia (2024)

Pada grafik terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian secara luas mencapai 7 juta jiwa lebih. Meskipun begitu, sektor pertanian semakin lama semakin ditinggalkan terutama pada kaum muda. Terjadi penurunan minat menjadi petani sehingga regenerasi petani terhenti ((Anwarudin et al., 2020); (Gultom & Harianto, 2022); (Adilest et al., 2023)). Hal ini dikarenakan banyak faktor terutama beralihnya fungsi lahan pertanian pada sektor lain. Faktor lain adalah bergesernya minat pada sektor lain karena dianggap lebih bergensi dan pasti seperti perdagangan dan industri manufaktur.

Izza et al., (2023) dalam kajiannya menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang terbesar kedua bagi perekonomian Indonesia dengan tingkat

pertumbuhan setara dengan tingkat nasional dan provinsi- provinsi besar lainnya di Jawa. Tiga sektor lapangan usaha utama penopang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur secara berturut-turut adalah sektor industri pengolahan (29,03%), perdagangan (18,18%), dan pertanian (12,80%). Industri manufaktur memiliki peran penting dalam proporsi PDB Nasional Indonesia secara konsisten. Di Provinsi Jawa Timur, industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar PDRB (Madhani et al., 2024). Pada Triwulan ke 3 Tahun 2023, Industri manufaktur berkontribusi sebesar 18,75% dari PDB Nasional, dan hal ini menjadikan industri manufaktur sebagai kontributor tertinggi PDB Nasional.

Keberadaan industri manufaktur sangat berperan dalam penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar dan berdampak. Faktor yang memberikan pengaruh terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur besar dan sedang di Provinsi Jawa Timur dalam penelitian ini adalah unit usaha. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan jumlah unit usaha maka meningkat pula unit usaha baru yang dibangun dan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga terjadinya penyerapan tenaga kerja (Eka et al., 2023).

Kebijakan yang berkaitan dengan ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor perdagangan dan industri manufaktur sangat mempengaruhi respons kaum muda. Responden menilai pembangunan kawasan industri yang berada di daerah sekitar sangat diharapkan agar mereka dapat bekerja dan tetap tinggal di daerah asal. Meskipun pembangunan dinilai relatif baik, namun tidak berdampak besar untuk mencegah untuk bermigrasi. Mereka mengambil keputusan untuk melakukan migrasi karena untuk mencari pekerjaan keluar daerah karena daerah asal tidak menyediakan kesempatan tersebut. Lee dalam Khalid & Urbanski (2021); Urbanski (2022) menyebutkan bahwa migrasi terjadi karena faktor penarik dimana salah satunya adalah ketersediaan lapangan kerja di daerah tujuan dan terbatasnya kesempatan kerja di daerah asal sebagai faktor pendorong. Beberapa kajian menyatakan bahwa urbanisasi terjadi akibat ketimpangan pembangunan desa - kota (Wilonoyudho et al., 2017); (Wijaya et al., 2021); (Wulandari, 2017).

Ketersediaan lapangan pekerjaan di daerah pedesaan menjadi hal penting untuk melakukan pembangunan daerah. Apabila kaum muda tidak banyak yang meninggalkan daerah, maka terdapat sumberdaya manusia yang potensial di pedesaan sebagai penggerak. Sulistiawati (2020) merumuskan strategi kebijakan perencanaan tenaga kerja yang perlu disusun antara lain adalah dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan memperluas kesempatan kerja yang ada melalui investasi sektor produktif, kemitraan mutualistik antar petani BUMN/BUMD, kebijakan makro yang melindungi pelaku usaha mikro, dan menjaga stabilisasi produksi dengan sistem terdigitalisasi. Penyiapan tenaga kerja yang juga harus dilakukan untuk menghasilkan sumberdaya manusia unggul.

#### **4. Kesimpulan**

Respons kaum muda pedesaan terhadap kebijakan pembangunan cenderung positif. Namun mereka menilai bahwa kebijakan pembangunan terutama dalam penyediaan lapangan pekerjaan masih kurang. Di sisi lain pembangunan kawasan industri yang berada di daerah sekitar sangat diharapkan agar mereka dapat bekerja dan tetap tinggal di daerah asal. Akibat tidak terpenuhinya harapan tersebut, mereka banyak yang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi untuk mencari pekerjaan keluar daerah. Diperlukan kebijakan dan strategi dalam pemerataan pembangunan, salah satunya dengan percepatan di daerah tertinggal

dengan mengoptimalkan potensi lokal seperti pertanian dan pengembangan sektor industri. Selain dari kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan secara fisik, juga perlu dilakukan persiapan dalam menghasilkan sumberdaya yang berkompeten.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adilest, J., Trinugraha, Y. H., Purwanto, D., Studi, P., Sosiologi, P., & Keguruan, F. (2023). Krisis Regenerasi Petani Muda di Tengah Industrialisasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(2), 1308–1313. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4871/http>
- Adriyanto, A., Prasetyo, D., & Khodijah, R. (2020). Angkatan Kerja dan Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 11(2), 66–82. <https://doi.org/10.35724/jies.v11i2.2965>
- Anwarudin, O., Sumardjo, S., Satria, A., & Fatchiya, A. (2020). The Entrepreneurial Capacity of Young Farmers on Agribusiness Activities in West Java. *Jurnal Penyuluhan*, 16(02), 267–276.
- BPS. (2023). *Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- BPS Kabupaten Pacitan. (2023). *Kabupaten Pacitan dalam Angka 2023*.
- Carolina, L. P. (2018). Strategi Peningkatan Kesempatan Kerja Berbasis Potensi Wilayah. *Jurnal Ecodunamika*, 1(2), 1–25.
- Deshmukh, V. P., & Sankpal. (2022). Factors influences for migration of indian students. *Journal of Positive School Psychology*, 6(4), 381–386.
- Eka, P., Widodo, N., & Woyanti, N. (2023). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang Jawa Timur Determinants of Labor Absorption in Large and Medium Manufacturing Industries in East Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5, 66–78.
- Fasa, A. W. H., Berliandaldo, M., & Prasetyo, A. (2022). Strategi Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan di Indonesia: Pendekatan Analisis PESTEL. *Kajian*, 1(1), 22–26.
- Faturahman, B. M. (2017). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2), 43–62. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jispo/article/view/2271>
- Frisnoiry, S., Sihotang, H. M. W., Indri, N., & Munthe, T. (2024). Analisis Permasalahan Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 17(1).
- Ginanjari, D. (2020). *Mentransformasikan Wajah Wilayah Perbatasan Jatim*. JawaPos.Com. <https://www.jawapos.com/opini/01303142/mentransformasikan-wajah-wilayah-perbatasan-jatim>
- Gultom, F., & Harianto, S. (2022). Lunturnya Sektor Pertanian di Perkotaan. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(1), 49–72.
- Izza, M. A. S., Wachdah, F. L., & Yasin, M. (2023). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 42–50. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1122>
- K, V. K., Sreekutty, U., George, V. M., & Arun, K. (2022). Life Quality or Better Income : Understanding the Reasons for Migration and PR of Students from Kerala , Studying Abroad. *2nd Indian International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Warangal, India*, 1626–1632.
- Khalid, B., & Urbanski, M. (2021). Approaches To Understanding Migration : A Mult-Country Analysis Of The Push And Pull. *Economics and Sociology*, 14(4), 242–268. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2021/14-4/14>

- Kustanto, M., & Sholihah, F. (2020). Reserve Brain Drain sebagai Alternatif Mengatasi Kemiskinan Reserve Brain Drain as an Alternative to Overcome Poverty. *Jurnal Litbang : Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 16(1 Juni), 63–76. <http://>
- Madhani, A. P., Muchtar, M., & Sihombing, P. R. (2024). Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur: Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Jumlah Unit Industri, dan Konsumsi Tembakau. *Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika Dan Ekonometrika*, 4 (1)(1), 20–32.
- Muslihatinningsih, F., & Abidin, J. (2022). Analisis Kemiskinan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 6(2), 132–147.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *Independent Journal Of Economics*, 2(3), 1–13.
- Paramithasari, I., Widayanti, S., Yuliati, N., & Wijayati, D. (2021). Kinerja Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Timur pada Masa Pandemi Covid-19 (Agricultural Sector Performance In East Java Province During The Covid-19 Pandemic). *Ziraa'ah*, 46(22), 428–440.
- Serli, R. N. T., & Kusuma, Y. B. (2023). Upaya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur dalam Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Timur. *Musyitari*, 3(1).
- Shintawati, C. P. A. (2023). Push-Pull Factors of Migration amidst Domestic Resistance of the Visegrad Group Countries. *Islamic World and Politics*, 7(2), 162–177.
- Sulistiawati, R. (2020). Strategi Kebijakan Perencanaan Tenaga Kerja Pasca Pandemic COVID-19 Dalam Perspektif Revolusi Industri 4.0 di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 114–129.
- Urbanski, M. (2022). Comparing Push and Pull Factors Affecting Migration. *Economies*, 10(21), 1–15.
- Wahyudi, A., & Sari, M. A. P. (2011). Kerjasama Antardaerah untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah dan Pelayanan Publik di Kawasan Perbatasan. *Jurnal Borneo Administrator*, 7(3), 283–307.
- Wijaya, H. B., Rudiarto, I., Hutama, S., & Wijaya, H. (2021). Migrant Workers Role in Rural-Urban Linkage , Case Study : Industrial Growth in Semarang Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1–12. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/738/1/012049>
- Wilsonoyudho, S., Rijanta, R., Keban, Y. T., & Setiawan, B. (2017). Urbanization and Regional Imbalances in Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 49(2), 125–132.
- Wulandari, F. (2017). Faktor Faktor yang Mempengaruhi Urbanisasi di Sumatra Barat. *Jurnal Ecosains*, 6(1), 15–24.
- Zelvianagita, F., & Prathama, A. (2023). Upaya Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UMKM Keripik Tempe di Desa Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi. *Journal Publicuho*, 6(2), 702–715. <https://doi.org/https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.194>.